

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Impact of Economic Growth on The Reduction of Poor People

Hermanto Siregar¹ dan Dwi Wahyuniarti²

¹ *Direktur Akademik MB-IPB dan Direktur Kajian Ekonomi & Lingkungan Brighton Institute.
Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran Bogor*

² *Junior Scholar, Brighton Institute.*

ABSTRACT

Economic growth, in general, is the indicator normally used to measure the achievement of the development. The objective of this paper is to understand and analyze the impact of economic growth on the number of poor people in Indonesia. The descriptive and econometric analyses were used to find out the linkage between economic growth and other factors on poverty by applying data provided by BPS and BI. The less impressive quality of economic development has shown by the figure of poverty which is relatively persistent above 20 percent during the last decade. The number of poor people caused by the economic crisis was not declined but even has a tendency to increase. The spread of poor was concentrated in Java and Sumatera, specifically in rural areas in which agriculture is the main source of income. The economic growth was significantly affecting the decreasing trend of poor people even though in a relatively small magnitude, such as inflation, number of population, and agricultural and industrial sectors shares. Education sector shows its significant and relatively high influence on the reduction of poor people. Based on these findings, policy recommendation to reduce the number of poor people is quality and fairness of growth as the obligatory requirement. Meanwhile, the sufficient requirement is suggested through the acceleration of agricultural and rural industrialization, the accumulation of human resource capital, the control of inflation rate to maintain purchasing ability, and the effective control of population growth rate, especially those poor people in the community.

Key words : *economic growth, poor people*

ABSTRAK

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Analisis deskriptif dan ekonometrika dilakukan untuk menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor lain terhadap kemiskinan dengan menggunakan data dari berbagai instansi seperti BPS dan BI. Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh angka kemiskinan yang relatif persisten di atas 20 persen dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir. Jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Penyebaran penduduk miskin terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, terutama di perdesaan dengan pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, *share* sektor pertanian, dan sektor industri. Namun, variable yang signifikan dan relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin adalah sektor pendidikan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut,

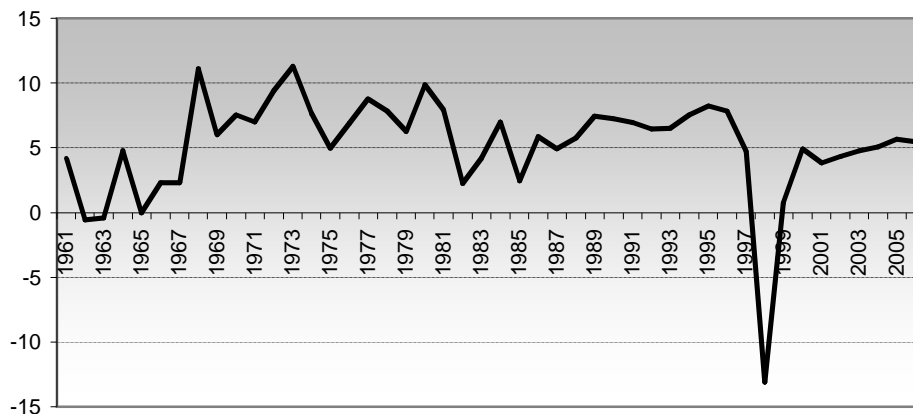
kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan syarat keharusan. Disamping itu diperlukan pula syarat kecukupan dengan mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia, pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dan pengendalian secara efektif pertumbuhan penduduk terutama masyarakat miskin.

Kata kunci : *pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin*

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan

Setelah melalui berbagai pergolakan domestik pasca-kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru melaju relatif cepat mulai tahun 1968. Pada kurun waktu 1968-1982 tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 7,65 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama kurun waktu tersebut ternyata belum sepenuhnya membuat kokoh stabilitas perekonomian nasional. Terjadinya *external shocks* yang dimulai dengan *OPEC Oil Price Shock II* di awal dekade 1980-an (tepatnya 1979 dan 1980) menyebabkan rataan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kala itu masih ditopang oleh ekspor migas turun menjadi sekitar 4,5 persen per tahun pada dekade tersebut. Perekonomian Indonesia baru bisa pulih dari dampak negatif goncangan (*shock*) minyak bumi mulai penghujung dekade 1980-an, dan mencatat rataan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen per tahun selama kurun waktu 1989-1993. Selanjutnya pada periode 1994-1996 tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat lagi menjadi 7,9 persen per tahun. Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selengkapnya disajikan pada Gambar 1.



Sumber: BPS

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1961-2006 (Persen per Tahun)

Pada pertengahan tahun 1997 pondasi perekonomian Indonesia yang sudah dibangun sekian lama mengalami guncangan hebat. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter telah “memporak-porandakan” perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terkontraksi hingga hanya mencapai angka 4,7 persen pada tahun 1997, kemudian merosot tajam menjadi sekitar -13,1 persen pada tahun 1998. Krisis ini juga berimbas pada indikator makro lainnya seperti inflasi yang meningkat hingga mencapai angka 78 persen (Lampiran 1). Tingginya angka inflasi ini menyebabkan tingkat harga terutama harga barang kebutuhan pokok melonjak drastis. Situasi ini semakin memperparah kemiskinan yang pada masa sebelum krisis belum teratasi secara berarti. Sementara itu, tingkat pengangguran juga meningkat signifikan akibat semakin minimnya lapangan pekerjaan dan PHK massal beberapa perusahaan dan industri yang berhenti beroperasi karena tingginya biaya produksi akibat depresiasi rupiah.

Secara perlahan, Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan walaupun masih menyisakan permasalahan mendasar akibat stagnasi ekonomi di masa krisis. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke tingkat pertumbuhan positif sebesar 0,79 persen dan terus meningkat lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Pada periode 1999-2003 rata-rata pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 3,7 persen. Selanjutnya pada periode 2004-2006 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rata-rata mencapai 5,4 persen. Namun secara umum, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia belum kembali seperti masa sebelum krisis.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat pulih tersebut diiringi dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi triwulanan (2006:4) sudah mencapai 6,1 persen, namun hal tersebut belum secara nyata dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja, sehingga seharusnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kemiskinan dan pengangguran masih meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi tengah meningkat?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin yang terjadi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE ANALISIS

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang

hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai Model Pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut (Dornbusch *et al.*, 2004):

$$Y = A.F(K,L)$$

di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi—yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

Share dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

$$\text{Output growth} = \left(\text{labor share} \times \text{labor growth} \right) + \left(\text{capital share} \times \text{capital growth} \right) + \text{technical progress}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam besarnya sumbangan input-input tertentu terhadap pertumbuhan output di masing-masing negara atau provinsi menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar Negara atau provinsi.

Model Solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu inputnya. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi oleh K dan L tetapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model Solow lainnya adalah dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal (*human capital*). Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai teori pertumbuhan endogen dengan pionirnya Lucas dan Romer. Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik, menentukan pertumbuhan ekonomi; sedangkan Romer berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi.

Secara sederhana, dengan demikian, fungsi produksi agregat dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

$$Y = A.F(K, H, L)$$

Pada persamaan di atas, H adalah sumberdaya manusia yang merupakan akumulasi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut Mankiw *et al.* (1992) kontribusi dari setiap input pada persamaan tersebut terhadap output nasional bersifat proporsional. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya *ceteris paribus* akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari pada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang.

Kemiskinan

Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen pada bagian terdahulu. Manakala garis kemiskinan menjadi pertimbangan, maka inflasi menjadi variabel yang relevan. Sebagai ilustrasi: suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat—lebih rendah dari laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel untuk mengurangi kemiskinan; variabel lain, seperti laju inflasi, juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh

jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Studi Terdahulu

Balisacan *et al.* (2002) melakukan studi mengenai pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia dan apa yang ditunjukkan oleh data subnasional. Studi tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki catatan yang mengesankan mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama dua dekade. Pertumbuhan dan kemiskinan menunjukkan hubungan kuat untuk tingkat agregat. Panel data yang dibangun dari 285 Kota/Kabupaten menyatakan perbedaan yang besar pada perubahan dalam kemiskinan, pertumbuhan ekonomi subnasional, dan parameter-parameter spesifik lokal. Hasil dari analisis ekonometrika menunjukkan bahwa selain pertumbuhan ekonomi, ada faktor lain yang juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat miskin terpisah dari dampaknya terhadap pertumbuhan itu sendiri. Di antaranya adalah infrastruktur, sumberdaya manusia, insentif harga pertanian, dan akses terhadap teknologi. Upaya memacu pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting dilakukan, namun selain itu juga diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih lengkap terkait dengan faktor-faktor yang relevan di atas.

Studi tentang pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia juga dilakukan oleh Suryahadi *et al.* (2006). Studi ini menekankan pada dampak lokasi dan komponen sektoral dari pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan diperdalam dengan membedakan pertumbuhan dan kemiskinan ke dalam komposisi sektoral dan lokasi. Hasil studi menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di perdesaan menurunkan kemiskinan di semua sektor dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai elastisitas kemiskinan yang tinggi dari semua sektor kecuali pertanian perkotaan. Selain itu pertumbuhan pertanian di perdesaan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemiskinan di sektor pertanian perdesaan, yang merupakan kontributor terbesar kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mempercepat pengurangan kemiskinan adalah dengan menekankan pada pertanian di perdesaan dan jasa di perkotaan. Namun dalam jangka panjang fokus penekanan harus diarahkan pada pencapaian pertumbuhan menyeluruh yang kuat dalam sektor jasa.

Suryadarma dan Suryahadi (2007) melakukan studi mengenai pengaruh pertumbuhan pada sektor swasta terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia untuk melihat dampak pertumbuhan di sektor publik dan swasta terhadap kemiskinan. Pertumbuhan belanja modal swasta digunakan sebagai proksi dari sektor swasta dan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah sebagai indikator sektor publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan di kedua sektor tersebut secara signifikan mengurangi kemiskinan, selain itu juga menghasilkan elastisitas yang relatif sama. Oleh karena itu, pertumbuhan pengeluaran baik di sektor publik maupun swasta akan mengurangi kemiskinan dua kali lebih cepat dari pada hanya berharap dari pengeluaran publik saja.

Implikasinya, sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dalam negeri sehingga sektor swasta dapat berkembang dan pada akhirnya mempercepat pengurangan kemiskinan.

Metode Analisis

Analisis yang dilakukan berupa analisis deskriptif dan analisis ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, sedangkan analisis ekonometrika, yang dilakukan dengan menggunakan panel data, dilakukan untuk menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor lainnya terhadap kemiskinan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai institusi pemerintah terutama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Panel data yang digunakan untuk analisis ekonometrika adalah *time series* tahun 1995 sampai 2005 dan *cross-section* dari 26 provinsi (sebelum pemekaran-pemekaran dan setelah disintegrasi Timtim). Variabel dan sumber data yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel yang Digunakan dalam Analisis

	Variabel	Satuan	Sumber
POVERTY	Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Orang	BPS, "Data dan Informasi Kemiskinan"
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	Juta Rp Harga Konstan 2000	BPS, "PDRB Propinsi di Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha"
AGRISHARE	<i>Share</i> pertanian terhadap PDRB	%	BPS, "PDRB Propinsi di Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha"
INDUSTRISHARE	<i>Share</i> industri terhadap PDRB	%	BPS, "PDRB Propinsi di Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha"
POPULASI	Jumlah Populasi	Orang	BPS, "Statistik Kependudukan"
INFLASI	Tingkat Inflasi (year-on-year)	%	BPS, "Berita Resmi Statistik"
SMP	Persentase lulusan sekolah menengah pertama	%	BPS, "Keadaan Angkatan Kerja Indonesia"
SMA	Persentase lulusan sekolah menengah atas	%	BPS, "Keadaan Angkatan Kerja Indonesia"
DIPLM	Persentase lulusan pendidikan diploma	%	BPS, "Keadaan Angkatan Kerja Indonesia"
DUMMYKRISIS	Non-krisis (≤ 1997) = 0 dan krisis (≥ 1998) = 1	-	

Berdasarkan uraian pada Bagian 2.1 dan 2.2, maka dapat dirumuskan model persamaan regresi kemiskinan sebagai berikut:

$$\text{POVERTY}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{ij} + \beta_2 \text{POPULASI}_{ij} + \beta_3 \text{AGRISHARE}_{ij} + \\ \beta_4 \text{INDUSTRISHARE}_{ij} + \beta_5 \text{INFLASI}_{ij} + \beta_6 \text{SMP}_{ij} + \beta_7 \text{SMA}_{ij} + \\ \beta_8 \text{DIPLM}_{ij} + \beta_9 \text{DUMMYKRISIS}_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Jumlah orang miskin diduga dipengaruhi oleh pendapatan (PDRB), jumlah populasi penduduk (POPULASI), pangsa sektor pertanian dalam PDRB (AGRISHARE), pangsa sektor industri manufaktur dalam PDRB (INDUSTRISHARE), tingkat inflasi (INFLASI), jumlah lulusan sekolah setingkat SMP (SMP), jumlah lulusan sekolah setingkat SMA (SMA), jumlah lulusan sekolah setingkat diploma (DIPLM), dan *dummy* krisis ekonomi (DUMMYKRISIS).

PDRB diharapkan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dimana peningkatan PDRB akan menyebabkan turunnya kemiskinan karenanya $\beta_1 < 0$. Sedangkan populasi diharapkan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan $\beta_2 > 0$, dimana peningkatan populasi akan meningkatkan kemiskinan. *Share* sektor pertanian dalam PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan, peningkatan *share* sektor pertanian akan menurunkan kemiskinan dengan $\beta_3 < 0$. Kontribusi sektor pertanian terhadap total penyerapan tenaga kerja Indonesia relatif tinggi (sekitar 44%), dimana pangsa pertanian terhadap output nasional sekitar 13 persen. *Share* sektor industri dalam PDRB juga berdampak negatif terhadap kemiskinan dengan $\beta_4 < 0$.

Inflasi akan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dimana peningkatan inflasi akan menyebabkan semakin banyaknya penduduk miskin karenanya $\beta_5 > 0$. Capaian pendidikan (SMP, SMA, dan DIPLM) diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sehingga $\beta_6 < 0$, $\beta_7 < 0$ dan $\beta_8 < 0$. Sedangkan *dummy* krisis diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan karenanya $\beta_9 > 0$.

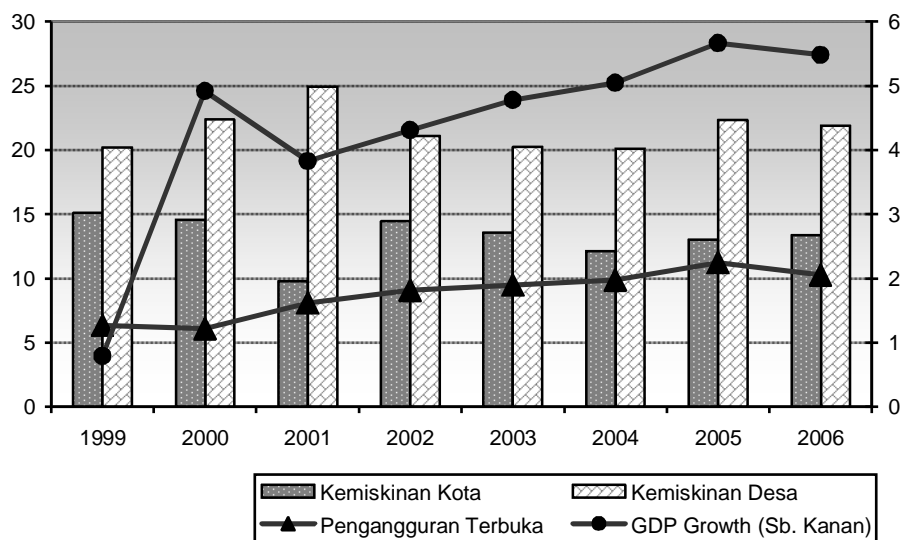
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Kendati kondisi perekonomian saat ini sudah berangsur pulih, yang ditunjukkan oleh semakin membaiknya kondisi makroekonomi nasional, namun masih banyak permasalahan-permasalahan mendasar yang belum tertangani secara berarti. Masih relatif tingginya angka kemiskinan (dan pengangguran) merupakan masalah kritical yang memerlukan perhatian serius. Pada Gambar 2 terlihat bahwa setelah melewati masa krisis, pada periode 1999-2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia—walaupun menunjukkan *trend* yang meningkat namun—belum bisa dikatakan berkualitas. Hal ini dicerminkan, antara lain, oleh relatif besarnya ketimpangan aktivitas perekonomian antarwilayah. Pada periode 2000-2005, rataan kontribusi terhadap PDB nasional masih didominasi oleh wilayah Jawa-Bali sebesar 60.7 persen (16.95 persennya adalah di Jakarta), diikuti

oleh Sumatera 22.39 persen, Kalimantan 9.28 persen, Sulawesi 4.17 persen, dan lainnya 3.46 persen.

Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi juga diindikasikan oleh laju pengangguran yang masih relatif tinggi dan sulit/lambat penurunannya (*persistent*). Sepanjang periode 1999-2006, rata-rata laju pengangguran justru positif yaitu sebesar 0.56 persen per tahun. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu tersebut terutama terjadi atau bersumber dari sektor-sektor yang cenderung padat modal (Siregar, 2006). Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi juga dicerminkan oleh angka kemiskinan (terutama kemiskinan di kawasan perdesaan) yang juga relatif persisten di atas 20 persen dalam delapan tahun terakhir (Gambar 2).



Sumber: BPS

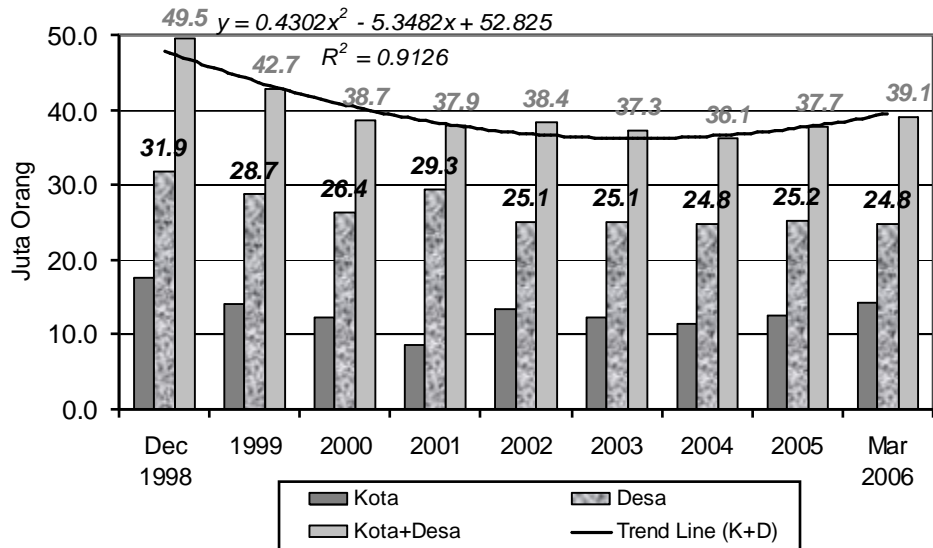
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran, Tahun 1999-2006 (Seluruhnya dalam Persen)

Sejalan dengan pengangguran, pada beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin menunjukkan *trend* umum yang meningkat (Gambar 3). Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, lonjakan harga minyak dunia yang menimbulkan *cost push inflation* yang signifikan, belum padunya para pengambilan kebijakan secara horisontal dan vertikal, serta berbagai terpaan bencana yang melanda Indonesia merupakan beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga kini belum tertangani secara berarti. Selama kurun waktu 1999-2006, terjadi kesenjangan kemiskinan yang cukup signifikan antara desa-kota, di mana tingkat kemiskinan di desa selalu lebih besar dari pada di kota. Relatif persistennya kemiskinan di perdesaan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi

yang terjadi belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kelas bawah khususnya di wilayah perdesaan.

Persebaran Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penduduk miskin di Jawa Timur berjumlah 8,19 juta orang sedangkan Jawa tengah sebesar 7,37 juta orang. Konsentrasi penduduk miskin di pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (Tabel 2). Sumatera menjadi daerah kedua setelah Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak (20,4% dari total penduduk miskin Indonesia). Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Sumatera rata-rata terus mengalami peningkatan, di mana Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 1,79 juta orang pada tahun 2005. Kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sedangkan distribusi penduduk miskin di pulau-pulau lain berada di bawah 10 persen dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia.



Sumber: BPS

Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Kota, Desa, dan Total Indonesia, 1998-2006

Berdasarkan data distribusi spasial penduduk miskin di Indonesia yang disajikan pada Tabel 2, terlihat bahwa terjadi pemusatan kemiskinan di Pulau Jawa

dan Pulau Sumatera. Hampir 78 persen penduduk miskin berada di kedua pulau ini, terutama di kawasan perdesaan. Untuk itu, program-program pengurangan kemiskinan sebaiknya lebih fokus pada wilayah pertanian di perdesaan Pulau Jawa dan Sumatera.

Tabel 2. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Pulau, 2000-2005

Pulau	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
Sumatera	18,5	18,4	21,8	21,8	21,8	20,0	20,4
Jawa	58,0	59,0	56,4	56,9	56,7	57,8	57,5
Bali + Nusa Tenggara	6,9	7,2	6,7	6,6	6,7	6,8	6,8
Kalimantan	5,4	4,4	3,8	3,7	3,6	4,2	4,2
Sulawesi	6,4	7,3	7,4	7,2	7,2	7,0	7,1
Maluku + Papua	4,8	3,8	3,9	3,8	4,1	4,2	4,1
Indonesia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS (diolah).

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Hasil analisis ekonometrika yakni estimasi model persamaan regresi kemiskinan diringkas pada Tabel 3. Setiap variabel independen masing-masingnya memiliki p-value yang lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha=0,10$), yang berarti bahwa setiap variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin. Koefisien determinasi model dugaan juga cukup tinggi (96,6%).

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Persamaan Regresi Kemiskinan Indonesia

Variabel	Parameter	Standard Error	t-Stat.	P-Value
Intercept	427.243,0	109299	3,91	0,0001
PDRB	-0,00891	0,000671	-13,27	<0,0001
Populasi	0,24871	0,00716	34,74	<0,0001
Agrishare	-4.495,90	1637,7	-2,75	0,0064
Industrishare	-11.567,10	2064,3	-5,60	<0,0001
Inflasi	2.375,07	407,8	5,82	<0,0001
SMP	-20.408,70	2067,1	-9,87	<0,0001
SMA	-888,88	501,6	-1,77	0,0775
Diplm	-7.035,20	3046,7	-2,31	0,0217
Dummykrisis	400.134,90	26615,4	15,03	<0,0001
R-Square=0.9662				

Peningkatan PDRB sebesar 1 unit akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,009 unit, *ceteris paribus*. Artinya setiap kenaikan PDRB sebesar Rp 1 triliun akan mengurangi atau menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 9000 orang. Hal ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Peningkatan jumlah populasi penduduk sebanyak 1000 orang akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 249 orang, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan perlunya pemerintah mengontrol pertumbuhan penduduk, yang memang relatif besar di keluarga miskin. Untuk itu, diperlukan penggalakan kembali program Keluarga Berencana, dengan fokus pada keluarga miskin.

Sama halnya dengan populasi penduduk, inflasi juga menunjukkan dampak dengan arah yang sama. Peningkatan inflasi sebesar 1 unit (persen per tahun) dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 2375 orang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi seyogianya tidak hanya dipandang demi kestabilan makro/moneter namun juga untuk menjaga dayabeli khususnya masyarakat golongan pendapatan terendah.

Dampak peningkatan *share* sektor pertanian dan *share* sektor industri ternyata dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dampak *share* industri terhadap kemiskinan lebih besar 2,6 kali daripada dampak *share* pertanian. Hasil estimasi ini mengindikasikan bahwa industrialisasi yang dilaksanakan secara tepat, dalam arti relatif bersifat padat karya dan berbasis pertanian, dapat mengurangi penduduk miskin (Banerjee dan Siregar, 2002).

Variabel pendidikan juga berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Dampak terbesar diperlihatkan oleh tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Dampak ini ternyata lebih besar dari pada dampak *share* sektor industri dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib belajar sembilan tahun harus diteruskan dan diperluas cakupannya hingga menjangkau masyarakat miskin yang lebih luas terutama di perdesaan. Pendidikan SMA dan diploma (DIPLM) juga memiliki besaran pengaruh yang relatif besar dalam mengurangi kemiskinan. Keseluruhan ini mencerminkan bahwa *human capital* merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Dummy krisis berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Terjadinya krisis memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap peningkatan jumlah orang miskin, yang terjadi karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan serta tingginya inflasi saat krisis sehingga menurunkan dayabeli masyarakat. Besarnya *magnitude* pengaruh krisis tersebut juga mengindikasikan bahwa kemiskinan yang bersifat persisten hingga kini sampai batas tertentu merupakan salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi 1997/1998.

Pembahasan mengenai Relatif Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan dampak terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Namun ternyata pengurangan jumlah penduduk

miskin yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak sebesar yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi kurang optimal dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi tersebut relatif masih belum cukup tinggi. Hukum Okun menyatakan bahwa laju pengangguran (u_t) berbanding terbalik dengan selisih laju pertumbuhan ekonomi (g_t) terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal (g_t^n), atau: $u_t = -\theta(g_t - g_t^n) + \varepsilon_t$ di mana θ adalah konstanta positif dan ε_t faktor-faktor lain yang secara agregat bersifat acak dengan rata-rata nol. Jika $g_t < g_t^n$ maka u_t meningkat, sehingga jumlah penduduk miskin juga meningkat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi di kawasan kantong kemiskinan relatif lambat. Adalah fakta bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan, di mana sekitar 2/3 penduduk miskin berada, relatif lambat. Ini kemungkinan berkaitan dengan kinerja sektor pertanian yang masih kurang menggembirakan. Pertumbuhan output sektor pertanian tahun 2005 hanya 2,5 persen, padahal tahun sebelumnya sektor ini telah bertumbuh sebesar 4,1 persen. Pertumbuhan output pertanian tahun 2005 sebesar 2,5 persen itu merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan output yang hanya 2,5 persen pada sektor pertanian, yang menjadi tumpuan penghidupan sekitar 44 persen tenaga kerja Indonesia (yang dari masa ke masa relatif sangat kecil penurunannya), tentu saja berakibat pada lambannya peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan dengan kesejahteraan pekerja di luar sektor pertanian.

Ke depan, diperlukan upaya-upaya nyata yang benar-benar dapat memacu peningkatan pendapatan para petani khususnya dan rakyat perdesaan umumnya, sehingga kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang telah dicanangkan Presiden RI medio tahun 2005 bisa diimplementasikan secara efektif. Ini membutuhkan kreatifitas dan kerja keras dari kementerian-kementerian terkait. Salah satu sentuhan nyata yang diperlukan adalah peningkatan teknologi, baik untuk pertanian (usahatani) maupun perikanan (budidaya dan tangkap), pada tingkatan *on farm* maupun pengolahan. Ketertinggalan dalam penggunaan teknologi secara relatif terhadap negara-negara tetangga menyebabkan relatif rendahnya produktivitas dan daya saing produk-produk pertanian dan industri agro Indonesia. Argumen sebagian ekonom yang menyatakan bahwa upaya peningkatan teknologi pada sektor padat karya, seperti pertanian dan industri agro, akan meningkatkan pengangguran tidak sepenuhnya benar. Nordhaus (2005) menunjukkan bahwa peningkatan teknologi pada sektor padat karya justru meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Logikanya ialah bahwa kenaikan produktivitas dan daya saing produk sektor tersebut akan menyebabkan harga jual yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan permintaan terhadap produk itu. Kenaikan permintaan ini meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Ketiga, masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Kuatnya keterkaitan antar sektor-sektor ini dengan sendirinya akan memperkuat bangun perekonomian Indonesia. Penguatan keterkaitan antara sektor pertanian dan industri agro dengan sektor-sektor lainnya berarti peningkatan mobilitas (aliran) bahan baku (output) di antara sektor-sektor tersebut. Sektor pertanian dan industri

agro, atau yang lebih umum yaitu 'industri' perdesaan berskala kecil dan menengah, perlu ditingkatkan keterkaitannya dengan usaha-usaha berskala besar dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, perkembangan yang terjadi pada usaha-usaha berskala besar (yang umumnya adalah sektor moderen berteknologi relatif lebih maju) akan dapat mengangkat kinerja pertanian dan pengolahan hasil pertanian berskala kecil-menengah atau UKM.

Menurut Sulekale (2003), struktur perekonomian Indonesia relatif mudah ambruk karena kurang seimbangny perhatian yang diberikan pemerintah pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok UKM dibandingkan pada kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok UKM. Sejauh ini, struktur output menurut skala usaha masih terlihat timpang. Data BPS menunjukkan bahwa 44,2 persen PDB Indonesia berasal dari usaha besar, sedangkan kontribusi usaha kecil terhadap PDB sekitar 40,6 persen. Padahal jumlah usaha besar di Indonesia (rata-rata periode 2000-2003) hanyalah 2 ribu unit, sementara jumlah usaha kecil mencapai 40.1 juta unit. Artinya pendapatan atau PDB per produsen UKM relatif sangat kecil.

Dalam struktur yang demikian, pembangunan UKM berpeluang besar meningkatkan pendapatan perkapita produsen. Namun diperkirakan hal ini perlu dilakukan dengan memfokuskan pembangunan itu pada kawasan-kawasan yang relatif tertinggal, seperti Kawasan Timur Indonesia (KTI) atau walaupun di Kawasan Barat Indonesia (KBI) namun di lokasi-lokasi yang memiliki banyak penduduk miskin. Hal ini dikemukakan dengan mempertimbangkan hasil analisis yang dilakukan di 45 negara oleh Beck *et al.* (2005), yang menemukan bahwa peningkatan peranan UKM dalam perekonomian berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita. Implikasinya ialah peningkatan peran UKM dalam perekonomian perlu dilaksanakan dengan memperhatikan distribusi UKM tersebut menurut kawasan. Pembangunan UKM di kawasan yang relatif tertinggal, seperti KTI dan lokasi-lokasi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang besar, diperkirakan berdampak lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Keempat, masih relatif terkonsentrasinya kegiatan pembangunan di Jawa khususnya dan di KBI umumnya. Tingginya konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa menyebabkan tingginya kompetisi penggunaan sumberdaya nontenaga kerja di kawasan tersebut. Secara alamiah, SDM dengan kualitas relatif rendah (yakni kelompok miskin) akan kalah dalam kompetisi tersebut. Akibatnya, tanpa campur tangan yang efektif dari pemerintah, kemiskinan akan persisten di kawasan tersebut. Hingga tahun 2004, sekitar 83 persen PDB nasional berasal dari atau terkonsentrasi di KBI. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga secara dominan berasal dari KBI; pada tahun 2004, hampir 88 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena pertumbuhan PDB di propinsi-propinsi yang berada di KBI. Pada periode 2001-2004, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari KTI cenderung menurun, dari sekitar 13 persen menjadi 12 persen. Untuk menghindari semakin melebarnya kesenjangan atau disparitas ekonomi antar KBI-KTI, maka aktivitas-aktivitas ekonomi di KTI

perlu ditingkatkan pembangunannya. Upaya-upaya untuk mempersempit kesenjangan KBI-KTI diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai lokasi di KTI, namun juga untuk memperkecil peluang dan keinginan sebagian kelompok yang ada di sana untuk melakukan disintegrasi dari NKRI.

Upaya pengembangan aktivitas ekonomi perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran awal dari *factor endowments* (limpahan sumberdaya) yang ada di kawasan tersebut. Ini sejalan dengan pandangan Rajan and Zingales (2006), yang menyatakan bahwa sebab utama dari *underdevelopment* (seperti yang terjadi di KTI) adalah sebaran awal dari sumberdaya kawasan yang bersangkutan. Ditambah dengan tingkat pendidikan yang umumnya rendah, penguasaan sumberdaya oleh kelompok-kelompok kecil dari populasi menyebabkan tingginya kesenjangan dan terjadinya *regional leakages* (kebocoran wilayah), sehingga upaya mengatasi *underdevelopment* semakin kompleks. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi keteringgalan ekonomi KTI dapat dilakukan: (i) dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat tempatan, (ii) membuka akses mereka terhadap sumberdaya, (iii) memperkuat keeratan sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat agar terhindar dari konflik dalam pemanfaatan sumberdaya, dan (iv) mendorong berlangsungnya reforma agraria yang akan mendorong terwujudnya usahatani dan industri pengolahan hasil pertanian yang mampu memberikan kesejahteraan memadai bagi rakyat tempatan sehingga memperbaiki rasa keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Perkonomian Indonesia yang sempat mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terhambat oleh krisis ekonomi yang menerpa kawasan Asia Timur. Setelah krisis berlalu ternyata pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum dapat menyamai pertumbuhan yang terjadi saat sebelum krisis. Jumlah penduduk miskin, yang meningkat signifikan sesaat setelah krisis ekonomi dan terjadi sampai saat ini, belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Persebaran penduduk miskin terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana kemiskinan terutama terjadi di daerah perdesaan dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Hasil analisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun *magnitude* pengaruh tersebut relatif tidak besar. Inflasi maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing-masingnya relatif kecil. Peningkatan *share* sektor pertanian dan *share* sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. Variabel yang signifikan dan relatif paling besar pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan ialah pendidikan.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Syarat kecukupannya (*sufficient condition*), misalnya laju inflasi serta laju populasi penduduk yang terkendali, industrialisasi pertanian/perdesaan yang tepat, serta akumulasi modal manusia yang relatif cepat, harus dipenuhi pula.

Implikasi Kebijakan

Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Investasi sebagai penyumbang pertumbuhan harus dilakukan dalam bentuk mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan perbaikan infrastruktur perdesaan (modal fisik). Hal ini membutuhkan campur tangan pemerintah dan partisipasi swasta secara signifikan.

Pengendalian inflasi wajib dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga peningkatan pendapatan yang diperolehnya menjadi lebih berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengendalian inflasi hendaknya lebih terfokus pada kawasan perdesaan. Laju pertumbuhan populasi penduduk perlu dikendalikan secara lebih efektif, terutama pada golongan penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakkan kembali program Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Balisacan, A., E.M. Pernia, dan A. Asra, 2003. *Revisiting Growth and Poverty in Indonesia: What do Subnational Data Show?*. Bulletin of Indonesian Economic Studies Volume 39, Issue 3. December 2003. Pages 329-351.
- Banerjee, S. dan H. Siregar, 2002. "Agriculture As The Leading Sector: An Industrial Policy Framework", *UNSFIR Working Paper 02/02*. United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), UNDP Office, Jakarta.
- Beck, T., A. Demirgüç-Kunt, and R. Levine. 2005. *SMEs, Growth, and Poverty*. NBER Working Paper 11224.
- BPS (Central Bureau of Statistics). Various Issues. *Berita Resmi Statistik (Official Statistics News Letter)*. BPS, Jakarta.
- BPS. Various Years. *Data dan Informasi Kemiskinan (Data and Information on Poverty)*. BPS, Jakarta.
- BPS. Various Years. *Gross Regional Domestic Product of Provinces in Indonesia by Industrial Origin*. BPS, Jakarta.
- BPS. Various Years. *Labor Force Situation in Indonesia*. BPS, Jakarta.
- BPS. Various Years. *Population Statistics*. BPS, Jakarta.

- Dornbusch, R., S. Fischer, dan R. Startz. 2004. *Macroeconomics*, 9th ed. McGraw-Hill, Boston.
- Mankiw, N.G., D. Romer, dan D. Weil. 2002. "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*.
- Nordhaus, W. 2005. *The Sources of the Productivity Rebound and the Manufacturing Employment Puzzle*. NBER Working Paper 11354.
- Qian, Y. 2003. "How Reform Worked in China", Chapter 11 in Rodrik (ed.), 2003, *In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth*. Princeton University Press, Princeton.
- Rajan, R.G. and L. Zingales. 2006. *The Persistence of Underdevelopment: Institutions, Human Capital, or Constituencies?* NBER Working Paper 12093.
- Sen, A. 1999. *Employment, Technology, and Development*, Indian ed. Oxford University Press, New Delhi.
- Siregar, H. 2006. "Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja", *Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan, INDEF*, Jakarta.
- Sulekale, D.D. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 14(2), Edisi April.
- Suryadarma, D. dan A. Suryahadi. 2007. *The Impact of Private Growth Sector on Poverty Reduction: Evidence from Indonesia*. SMERU Working Paper, April 2007.
- Suryahadi, A., D. Suryadarma. dan A. Sumarto. 2006. *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Pectoral Components of Growth*. SMERU Working Paper, August 2006.
- World Bank. 2007. *Spending for Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities – Indonesia Public Expenditure Review 2007*. The World Bank Office, Jakarta.

Lampiran 1. Pertumbuhan GDP, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBI, 1998-2006

Tahun	Pertumbuhan GDP	Tingkat Inflasi	Nilai Tukar	SBI 3 Bulan
	1*	2*	3*	4*
1998	-13.13	77.63	9874.58	27.01
1999	0.79	2.01	7808.91	23.57
2000	4.92	9.35	8534.42	12.31
2001	3.83	12.55	10265.67	16.40
2002	4.31	10.03	9261.17	15.60
2003	4.78	5.06	8571.17	10.17
2004	5.05	6.40	8985.42	7.39
2005	5.67	17.11	9750.58	9.16
2006	5.48	6.60	9141.25	11.97

Catatan : 1* %, Sumber: BPS
2* % (year on year), Sumber: BPS
3* Rp per USD (Kurs tengah rata-rata tahunan), Sumber: BI
4* SBI % (Rata-rata tahunan), Sumber: BI